

# **PENCEGAHAN PERKEMBANGAN KAWASAN KUMUH MELALUI PRIORITAS PENANGANAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PERMUKIMAN SEKITAR PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE KOTA SUNGAI PENUH**

**Trivaldo Alviyanda<sup>1)</sup>, Tomi Eriawan<sup>2)</sup>**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Universitas Bung Hatta

Email: [alviyandatrivaldo95@gmail.com](mailto:alviyandatrivaldo95@gmail.com)<sup>1)</sup> [tomierawan@bunghatta.ac.id](mailto:tomierawan@bunghatta.ac.id)<sup>2)</sup>

## **ABSTRAK**

Berdasarkan SK Kumuh Kota Sungai Penuh kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berada di wilayah administratif Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai Penuh merupakan kawasan kumuh. Padahal disekitar pasar tersebut terdapat kawasan permukiman yang memiliki ciri-ciri kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan infrastruktur yang sesuai dijadikan prioritas peningkatan. Metode analisis yang dipakai yaitu analisis pembobotan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan mengetahui prioritas penanganan infrastruktur. Hasil penelitian ini adalah tingkat kekumuhan kawasan permukiman sekitar pasar adalah tidak kumuh dan prioritas penanganan infrastrukturnya adalah pengelolaan persampahan. Perlu dilakukan intervensi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

**Kata kunci : Permukiman Kumuh, Prioritas Penanganan, Pasar Tradisional Tanjung Bajure**

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk permukiman yang tetap maka terjadi persaingan untuk mendapatkan tempat bermukim. Persaingan tempat bermukim ini bukan hanya dilihat dari ketersediaan lahannya saja, tapi masyarakat juga melihat dari sisi lokasi.

Kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure diperuntukan bagi aktivitas perdagangan dan jasa. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat baik dari Kota Sungai Penuh sendiri maupun kota-kota kecil disekitarnya untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pasar tradisional Tanjung Bajure tersebut. Kebanyakan kaum urbanis yang datang adalah mereka yang ingin berjualan di pasar dan sebagian besar mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mencari tempat tinggal di sekitar kawasan pusat perdagangan ini.

Berdasarkan SK Kumuh Kota Sungai Penuh kawasan Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berada di wilayah administratif Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai Penuh merupakan kawasan kumuh. Padahal disekitar pasar tersebut terdapat kawasan permukiman yang memiliki ciri-ciri kumuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan infrastruktur yang sesuai dijadikan prioritas peningkatan di kawasan permukiman.

## **METODE**

Metode pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan penyebaran kuisioner langsung terhadap responden

mengenai 7 indikator kumuh. Tetapi hanya 4 indikator kumuh yang akan dilakukan pendataan kuisioner, seperti kondisi drainase menurut kriteria limpasan air hujan, kondisi air minum, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan. Karena 4 indikator kumuh tersebut merupakan data rumah tangga. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, instansi dan lembaga yang terkait, yang berhubungan dengan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis pembobotan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan mengetahui prioritas penanganan infrastruktur berdasarkan 7 indikator kumuh menurut Permen PU No. 14 Tahun 2018. Setelah mengetahui tingkat kekumuhan dan prioritas penanganan infrastruktur, kemudian dilakukan penanganan yang sesuai untuk pencegahan perkembangan permukiman kumuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari tahap analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekumuhan kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure berdasarkan 7 indikator kumuh didapat hasil tingkat kekumuhannya adalah tidak kumuh. Karena memiliki nilai kumuh 15 yang berarti tidak kumuh menurut Permen PU No. 14 Tahun 2018. Infrastruktur dengan kerusakan dan penurunan kualitas pada kawasan permukiman adalah kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan (36,75%), ketersediaan akses aman air minum (31,11%), tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (25,56%), ketidakmampuan mengalirkan limpasan air (0,63%), ketidaktersediaan drainase (16,68%), kualitas

konstruksi drainase (14,48%), prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis (10.00%), prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis (92.22%), sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis (42.22%), ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran (20.84%) dan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran (100%).

Kemudian analisis penentuan prioritas penanganan infrastruktur dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan atau tingkat nilai kumuh paling tinggi. Penanganan prioritas infrastruktur pada tingkat kerusakan atau kekumuhan paling tinggi perlu dilakukan pencegahan karena kawasan berpotensi menjadi kumuh jika tidak dilakukan tindakan penanganan. Berdasarkan hasil analisis prioritas penanganan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa klasifikasi keparahan tertinggi terdapat pada pengolahan persampahan dengan klasifikasi Tingkat Keparahannya Sedang. Serta untuk tingkat keparahan rendah ada pada kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, dan kondisi pengolahan air limbah.

Kemudian pada rencana penanganan pengelolaan persampahan dilakukan berdasarkan permasalahan yaitu:

1. Perilaku negatif masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, di ruang terbuka, lahan kosong, jalan dan dibakar.
2. Tidak memiliki sarana persampahan baik itu tempat sampah dengan pemilahan sampah, TPS, dan pengolahan sampah terpadu skala lingkungan. Sarana pengolahan sampah wadah komunal (TPS) hanya tersedia pada RT 08 Kelurahan Pondok Tinggi.
3. Tidak memiliki prasarana persampahan sehingga terdapat masyarakat yang tidak terlayani pengangkutan sampah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan perencanaan penanganan yang terdiri dari:

1. Rencana peningkatan cakupan pelayanan dan rencana penyediaan sarana terdiri dari:
  - a. Rencana sistem pengelolaan persampahan dengan merencanakan pewadahan persampahan menjadi dua wadah organik dan non organik serta rencana pengangkutan persampahan dilakukan setiap hari yang bertujuan meminimalisir terjadinya penumpukan sampah.
  - b. Rencana sosialisasi persampahan dilakukan dengan mensosialisasikan pemilahan persampahan dan sosialisasi mengenai persyaratan TPS/TPA. Sosialisasi pemilahan persampahan bertujuan memberi pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis sampah dan perbedaan sampah organik dan sampah non-organik sehingga rencana sistem pengelolaan persampahan dapat terlaksana sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Sosialisasi mengenai persyaratan TPS/TPA dan pengelolaan

persampahan sesuai dengan persyaratan teknis bertujuan memberi pengetahuan terhadap masyarakat yang selama ini salah dengan menganggap lahan terbuka sebagai sarana tempat penampungan sementara atau tempat pemrosesan akhir

2. Rencana penyediaan sarana dan prasarana persampahan dilakukan dengan rencana penyediaan sarana pengelolaan persampahan dengan menyediakan wadah komunal (TPS/TPS 3R) untuk jenis sampah non organik dan sampah organik berjumlah 9 pasang unit dengan volume 1 meter<sup>3</sup>. Rencana penyediaan prasarana pengelolaan persampahan dilakukan dengan menyediakan truk/mobil pickup bersekat sebagai prasarana pengangkutan sampah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penilaian tingkat kekumuhan yang dilakukan dari 7 indikator yaitu dikawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure, diperoleh nilai kumuhnya adalah 15 yang berarti tidak kumuh. Dengan tingkat keparahan pada kondisi pengelolaan persampahan dilakukan penanganan sebagai prioritas peningkatan kualitas infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh, diharapkan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan intervensi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih dan meningkatkan kualitas infrastruktur, walaupun di kawasan permukiman sekitar Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak memiliki tingkat kekumuhan. Pencegahan dan penanganan infrastruktur di fokuskan pada infrastruktur kondisi pengelolaan persampahan. Meskipun seluruh infrastruktur tidak memiliki tingkat keparahan yang tinggi tetapi berpotensi untuk penurunan kualitas infrastruktur tersebut, oleh karena itu pemerintah juga perlu memperhatikan infrastruktur yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Standar Nasional. 2009. SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [2] Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- [3] Menteri Pekerjaan Umum. 2013. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga